

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aziz, Abdul , 2009, *Komparasi Tentang Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Klasik Dengan Negara Modern* , Progam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Azra, Azyumardi, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Prenada Media, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Koernianto, Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasution, Bahderjohan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Prins, J, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahr, Saidus, 1976, *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Bandung.

B. Tesis

Meylani, Yosy, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Tionghoa di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Jayanthi, Komang Eva, “Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Nyentana Menjadi Perkawinan Biasa Terhadap Kedudukan Anak Kandung Dan Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan”, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 2017.

Ruswandi, Yanuar, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Dayak Desa Yang Melakukan Perkawinan Antar Suku di Kecamatan Kelam Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Swedia

Lagen. Nu Äktenskapsbalk (1987:230) Undang-undang Swedia tentang Perkawinan dan Kewarganegaraan.

D. Internet

Jenis-jenis Pawiwahan dalam Manava Dharmasastra, <http://www.mangbuda.com>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

KEMLU, “Pendaftaran Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran”, <http://www.kemlu.go.id/stockholm.aspx>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

KPAI, “Status Hukum Kewarganegaraan Hasil Perkawinan Campuran”, <http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 01 November 2017.

SJ Christanto, “Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik”, <http://www.academia.edu/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

Suwarningsih, “Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI”, <http://www.baliprov.go.id>, diakses tanggal 12 April 2018.